

Implikasi Manajemen Pembiayaan Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Dasep Supriatna¹, Nasrudin Harahap², Nurul Hidayati Murtafiah³

^{1,2,3}Universitas Islam An Nur Lampung, Jl. Pesantren, Sidoharjo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
dasepazmatkhan@gmail.com

Abstract

This study intends to decide the Ramifications of Funding The board for Working on the Nature of Schooling. This sort of exploration utilizes library/library studies. The creator gathers different writing connected with specific subjects, in particular on working on the nature of training and schooling supporting. Then gathered via classification from different writing the two books and diaries that have something to do with the material. The aftereffects of the review show that the Ramifications of Working on the Nature of Schooling with Training Subsidizing are through the suspension/portion of assets in the RAPBM, in particular the designation of assets for understudies as extracurricular exercises, the allotment of assets for educators through expanding instructor impressive skill as compensations and stipends, the distribution of assets for offices and framework, to be specific by expansion of offices, improvement of offices and foundation as well as support. in training supporting norms, incorporates: a) instructive unit speculation costs, b) individual expenses, c) instructive unit functional expenses. So that in overseeing schooling, this supporting framework should be overseen appropriately as per the SBU (general expense standard) and SBK (unique charge standard) set by the Public authority.

Keywords: Management, Financing and Quality of Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Manajemen Pembiayaan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan/library. Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik tertentu, yaitu tentang peningkatan kualitas pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Kemudian kemudian dikumpulkan dengan cara tabulasi dari berbagai literatur baik buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan materi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Implikasi Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Pembiayaan Pendidikan adalah melalui penangguhan/alokasi dana dalam RAPBM yaitu alokasi dana untuk siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, alokasi dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan penambahan sarana, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan. dalam standar pembiayaan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi satuan pendidikan, b) biaya pribadi, c) biaya operasional satuan pendidikan. Sehingga dalam mengelola pendidikan, sistem pembiayaan inilah yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan SBU (standar biaya umum) dan SBK (standar biaya khusus) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kata Kunci : Manajemen, Pembiayaan dan Mutu Pendidikan

Copyright (c) 2023 Dasep Supriatna, Nasrudin Harahap, Nurul Hidayati Murtafiah

Corresponding author: Dasep Supriatna

Email Address: dasepazmatkhan@gmail.com (Jl. Pesantren, Sidoharjo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung)

Received 23 June 2023, Accepted 27 June 2023, Published 1 July 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki dampak penuh pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses dan output pendidikan yang benar-benar berkualitas. Berbagai pihak berusaha untuk bersinergi dan bertanggung

jawab dalam peningkatan mutu pendidikan, mulai dari pemerintah, penyelenggara pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan, dan sebagainya. Semua itu harus bersinergi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Warisno, 2018).

Ada dua faktor yang menyebabkan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih berorientasi pada input. Strategi demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa ketika semua input pendidikan telah terpenuhi, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan menghasilkan output yang berkualitas. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori fungsi produksi pendidikan tidak sepenuhnya berfungsi di lembaga pendidikan tetapi hanya terjadi di lembaga ekonomi.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih berorientasi makro. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan pada level makro dan tidak berjalan sebagaimana mestinya pada level mikro (madrasah), sehingga memberikan pemahaman bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih diperhatikan faktor proses pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional disamping prioritas lainnya yaitu menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pendidikan untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan relevansi melalui keterkaitan dan pemerataan keterampilan (Zulkarnain et al., 2022).

Untuk mencapai peningkatan kualitas sesuai keinginan berbagai pihak, salah satu faktor utama yang erat kaitannya dengan masalah pembiayaan. Semakin besar jumlah biaya pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan (Murtafiah, 2021). Oleh karena itu, jika kita ingin meningkatkan kualitas dana pendidikan harus dilipatgandakan. Pembiayaan dan pendanaan merupakan sumber daya yang secara langsung mendukung efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal ini lebih terasa lagi dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam konteks MBS yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana.

Pendidikan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan menunjukkan hasil yang nyata dalam waktu singkat (Aryani et al., 2022). Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua (keluarga) untuk menyekolahkan anaknya harus dilihat sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi untuk jangka waktu tertentu, di masa yang akan datang, harus dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat langsung bagi mutu sekolah, khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk

membayar guru maupun untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini juga tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, padahal pendidikan yang berkualitas selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana (Fathoni, 2019). Penyelenggara pendidikan diharapkan mampu mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, upaya peningkatan mutu pendidikan perlu didukung oleh kemampuan kepemimpinan manajerial. Pengelola harus berusaha mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien agar dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan merupakan potensi yang sangat urgen, dan merupakan bagian integral dari kajian manajemen pendidikan.

Bagian pendukung sekolah adalah bagian kreasi yang menentukan pelaksanaan latihan-latihan instruktif, dalam hal ini pengalaman mendidik dan dididik. Setiap gerakan edukatif akan dilakukan dengan asumsi administrasi subsidi sekolah besar. Bagian pendanaan akan mendukung pencapaian tujuan instruktif. Kelancaran pengeluaran rencana pengeluaran otoritas publik akan mempengaruhi kelancaran instruksi. Otoritas publik telah menguasai norma-norma pendukung, sehingga pendanaan berjalan dengan baik dan mudah. Hal ini tertuang dalam Peraturan No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang bagaimana seharusnya sekolah menyikapi rencana keuangan pembelajaran yang telah direncanakan oleh otoritas publik melalui rencana belanja negara. Sementara itu, pasal 49 menyebutkan bahwa penugasan cadangan sekolah sekitar 20% dari APBN dan APBD (Apriyani et al., 2022).

Selanjutnya, cenderung dirasakan bahwa bekerja pada sifat Pendidikan benar-benar membutuhkan dukungan atau dana di sekolah eksekutif. Mengingat betapa pentingnya pembiayaan ini, digunakan sebagai salah satu pedoman Pendidikan publik. Kondisi saat ini sangat menegangkan bagi organisasi pendidikan yang berurusan dengan norma subsidi yang sangat kecil. Selain itu, pengawas Pendidikan menipu dengan mengalihkan semua bantuan untuk menyekolahkan para eksekutif. Misalnya, adanya bantuan BOS yang tidak ideal yang ditunjukkan dengan norma-norma yang berlaku, penyalahgunaan cadangan bantuan, bahkan penyelewengan dan penodaan subsidi BOS yang seharusnya digunakan tanpa batas.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan/library. Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik tertentu, yaitu tentang peningkatan kualitas pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Kemudian kemudian dikumpulkan dengan cara tabulasi dari berbagai literatur baik buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan materi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel. Berdasarkan berbagai sumber bacaan dan pengalaman penulis tentang topik ini, penulis menjabarkannya ke dalam sebuah laporan penelitian

HASIL DAN DISKUSI

Gagasan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kualitas sangat penting dalam berbagai hal dan latihan, khususnya di bidang Pendidikan. Jadi kualitas digunakan sebagai ekspektasi dan digunakan sebagai tujuan dalam berbagai latihan ini. Nah, jika kita berbicara tentang peningkatan kualitas, khususnya di bidang Pendidikan, ini telah menjadi titik yang mengharukan dan berlangsung selamanya untuk belajar, berbicara, belajar atau ujian dan bahkan menjadi bagian yang sangat panas dan nyata. masalah. Jadi diskusi ini tidak akan pernah menjadi bahan pembicaraan sehingga kami terinspirasi untuk menjalankannya.

Hal ini menunjukkan tanda bahwa peningkatan kualitas merupakan usaha yang khas serta simbol yang harus dicapai dalam sebuah organisasi Pendidikan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sifat pendirian yang instruktif, diperlukan upaya dan sistem yang berbeda. Usaha dan teknik yang diterapkan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas tentunya membutuhkan kerja keras dan kerja keras dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun penyedia pendidikan. Selanjutnya hakikat pendidikan adalah suatu tingkat kehebatan dalam penyelenggaraan Pendidikan secara berhasil dan efektif untuk melahirkan kehebatan skolastik dan ekstra kurikuler pada peserta didik (siswa) yang dinyatakan lulus satu pendidikan atau tamat pendidikan tertentu.

Bagian-bagian yang berhubungan dengan hakikat pendidikan adalah yang pertama, persiapan dan inspirasi siswa. Kedua, kapasitas tenaga pendidik ahli dan partisipasi dalam asosiasi sekolah. Ketiga, rencana pendidikan mengandung makna isi dan pengalaman tumbuh fungsional. Keempat, kantor dan yayasan mengingat kecukupan dan kecukupan untuk mendukung pengalaman yang berkembang. Kelima, dukungan kelompok masyarakat (wali, lulusan dan klien sekolah) dalam program peningkatan Pendidikan sekolah.

Gagasan penting tentang Prinsip-Prinsip Kualitas Pendidikan dan Pembiayaan Pendidikan

Menurut (Fattah, 2018), hakikat Pendidikan adalah peningkatan kemampuan siswa. Pendidikan bisa dikatakan bagus jika siswa dapat mengembangkan kemampuannya tanpa batas. Seperti yang ditunjukkan oleh (Mesiono & Haidir, 2021), sifat instruksi adalah kapasitas organisasi instruktif dan unit instruktif untuk mengawasi dan menggunakan aset instruktif untuk lebih mengembangkan kapasitas pembelajaran. Organisasi pendidikan yang dimaksud adalah yayasan pendidikan formal dan non formal. Jadi Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan esensial untuk dikuasai sehingga mereka dapat mengikuti dan, secara mengejutkan, menjadi pelopor dalam pembentukan kembali dan perubahan. Demikian pula menurut (Mansyur, 2018), hakikat Pendidikan adalah suatu sistem Pendidikan yang dapat melahirkan lulusan pada berbagai tingkatan dan jenis yang memiliki kapasitas, nilai, dan mentalitas, baik kapasitas keilmuan, kecakapan, dan mendalam, serta memiliki sikap amanah, disiplin, sikap kerja keras yang tinggi, normal, inovatif, memiliki rasa tanggung jawab terhadap umat manusia, masyarakat dan jati diri, serta memiliki pribadi yang terhormat, percaya diri dan bertakwa. Sesuai (MURTAFAH & HIDAYAH, 2022) bahwa Pendidikan yang berkualitas

bukan hanya sekolah yang menciptakan wawasan ilmiah namun perlu menumbuhkan seluruh jajaran pengetahuan manusia yang menggabungkan berbagai bagian budaya.

Hal ini juga disinkronkan dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Umum pasal 2, bahwa tujuan pembinaan umum adalah untuk membina kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakal sehat, berpendidikan, mahir, imajinatif, bebas, dan berubah menjadi penduduk yang berbasis suara dan sadar untuk mengajarkan eksistensi negara. Oleh karena itu, pedoman mutu dalam pembinaan pengurus merupakan hal mendasar dan terpenting dalam mendidik para eksekutif. Pendekatan yang harus diperhatikan dalam menggarap hakikat Pendidikan, lebih spesifiknya yang pertama adalah perbaikan terus-menerus (*constant improvement*). Gagasan ini menyimpulkan bahwa penyelenggara pendidikan pada umumnya melakukan berbagai peningkatan dan penyempurnaan secara terus-menerus untuk menjamin bahwa semua pemasok pendidikan telah memenuhi prinsip-prinsip kualitas yang telah ditetapkan.

Ide ini terus menyegarkan siklus pendidikan mengingat kebutuhan dan permintaan pelanggan atau pelanggan layanan pendidikan. Dengan asumsi permintaan dan kebutuhan klien berubah, administrasi yayasan pendidikan akan secara otomatis mengubah kualitas, dan secara konsisten memperbaiki komponen produksi atau komponen di institusi pendidikan. Kedua, memutuskan prinsip mutu (*konfirmasi mutu*). Definisi ini digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip kualitas untuk semua bagian yang bekerja selama waktu yang dihabiskan untuk mengantarkan atau mengubah alumni yayasan pendidikan. Norma mutu Pendidikan, misalnya, dapat berupa penguasaan atau penjaminan kemampuan mendasar dalam setiap bidang penguasaan, dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Selain itu, para pelaksana juga harus menetapkan prinsip-prinsip kualitas materi rencana pendidikan dan norma penilaian yang akan digunakan sebagai alat untuk mencapai pedoman kemampuan dasar. Panduan untuk sifat dari pengalaman yang berkembang juga harus ditata, seperti dalam persyaratan administrasi untuk menetapkan standar kualitas untuk pengalaman yang berkembang yang dianggap mampu untuk meningkatkan siklus pembuatan dan memberikan item yang tepat, khususnya ace.

Oleh karena itu, salah satu upaya dan teknik yang dilakukan oleh otoritas publik dengan tujuan akhir untuk menggarap sifat Pendidikan sehingga dapat memberikan pelatihan yang berkualitas adalah dengan menetapkan peraturan dan PP yang termasuk dalam GBHN, Peraturan Sistem Pendidikan Negeri No. 20 Tahun 2003, PP no. 19 Tahun 2005, dst. Dari sini sangat dapat dimaklumi, dalam menggarap hakikat Pendidikan ada yang harus dipenuhi dalam sistem Pendidikan umum sesuai dengan peraturan, yaitu norma-norma penunjang pembinaan khusus. Prinsip pendanaan instruksi adalah pedoman yang mengatur bagian dan biaya fungsional unit pendidikan yang sah untuk satu tahun. Ada tiga macam biaya dalam norma ini, antara lain: a) biaya usaha satuan pendidikan, b) biaya individu, c) biaya fungsional satuan pendidikan (Nurkamiden & Anwar, 2023).

Mengenai subsidi, (Imron, 2016) memahami bahwa biaya rendah memengaruhi sifat pelatihan di sekolah dasar dan bertambahnya pengalaman serta sifat hasil yang disampaikan. Ini benar-benar berarti bahwa ada hubungan positif antara biaya pendidikan dan bekerja pada sifat pendidikan di organisasi pendidikan yang berbeda, baik formal maupun non-formal, baik negeri maupun swasta. Dengan demikian penyelenggara pendidikan harus menggunakan aset yang ada, menyaring penggunaan aset yang ada terhadap kepentingan aset tersebut, dan mendukung setiap perselisihan dengan penyelidikan kuantitatif menggunakan bantuan pemeriksaan biaya.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Umum Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi harus bekerja sama untuk membantu dan mengusahakan tersedianya sumber daya untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada setiap orang atau penduduk Indonesia berusia tujuh sampai lima belas tahun. . Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap siswa pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat hibah bagi orang yang berhasil tetapi walinya tidak mampu membiayai sekolahnya dan mendapat biaya pendidikan bagi yang walinya tidak mampu. untuk membiayai sekolah mereka. Setiap siswa wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan sekolah, kecuali siswa yang dikecualikan dari komitmen ini sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku. Kemudian mengingat Peraturan no. 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pengajar dan Penutur Pasal 13 bahwa Badan Publik dan Badan Legislatif Daerah diharapkan memberikan rencana pembiayaan untuk pembinaan kemampuan skolastik dan pengukuhan pengajar bagi pendidik di tempat-tempat yang dipilih oleh satuan pendidikan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, pemerintah lingkungan, dan pemerintah daerah. daerah setempat (pendirian). Sekolah yang didanai pemerintah menyiratkan bahwa unit pelatihan diawasi oleh legislatif pusat dan daerah, misalnya, sekolah resmi tanpa henti dengan status negara bagian. Sedangkan SPP adalah sekolah yang statusnya diawasi oleh daerah setempat. Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana pengeluaran untuk bekerja pada kemampuan skolastik dan sertifikat guru diatur oleh PP (hukum tidak resmi) (Rohiyatun, 2019).

Konsekuensinya, kondisi uang atau dana dalam pelatihan merupakan salah satu aset yang secara langsung menjunjung tinggi kecukupan dan efektifitas pendidikan para pelaksana. Hal ini secara signifikan lebih diartikulasikan dalam pelaksanaan Administrasi Berbasis Sekolah (MBS), yang meminta kapasitas lembaga pendidikan untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai serta bertanggung jawab untuk mengawasi subsidi secara lugas dan bertanggung jawab kepada daerah setempat dan pemerintah (Azhari & Kurniady, 2016).

Hal ini sangat signifikan terkait dengan MBS (administrasi berbasis sekolah) di setiap sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah atau yayasan pendidikan untuk mengelola dana sekolah mereka sesuai pedoman yang tepat. Demikian seperti yang ditunjukkan oleh (Fattah, 2018), bahwa konsekuensi pelaksanaan diklat berbasis sekolah adalah memberikan posisi kepada sekolah untuk mengurus asetnya sendiri. Sekolah diberi kewenangan untuk mencari aset dan menggunakannya dengan memperhatikan standar tanggung jawab dan keterusterangan. Setiap sekolah berusaha

mendapatkan aset dari daerah setempat, baik daerah menggunakan administrasi sekolah (wali murid) maupun individu dari daerah setempat dan dunia usaha, namun tidak membatasi.

Demikian (Munir, 2013) mengatakan bahwa model pembiayaan sekolah memiliki sisi yang berbeda, yaitu sisi porsi dan sisi pembayaran. Seperti yang diungkapkan oleh (Kurniady et al., 2018), pada dasarnya penunjang diurutkan menjadi dua model, yaitu:

1. Model Hebat Tingkat. Model Level Hebat bertujuan sebagai kerangka penyebaran aset, di mana semua komunitas lokal atau wilayah/perkotaan mendapatkan ukuran aset yang sama untuk setiap siswa tanpa menunjukkan perbedaan dalam kapasitas teritorial. Daerah yang kekayaannya kaya dan daerah yang kekayaan alamnya tidak menjunjung tinggi (miskin), ke belakang setiap program pelatihan mendapat aset dalam jumlah yang sama dan ditentukan per siswa dalam 1 (satu) tahun yang tercermin sebagai kebutuhan pengalihan dalam satuan biaya yang diberikan kepada sekolah.
2. Model Leveling. Model Leveling ini bergantung pada kemampuan daerah setempat untuk membayar. Orang miskin pasti ingin mendapatkan bantuan keuangan lebih serius daripada orang dengan mata pencaharian yang lebih baik. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang kurang beruntung akan memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah lain, yang berarti bahwa setiap daerah akan mendapatkan jumlah sumber daya yang berbeda setiap tahun tergantung pada bagaimana hal-hal tersebut disampaikan oleh kemampuan kabupaten.

Dari pemaparan di atas, dapat beralasan bahwa dalam mengatur subsidi pendidikan diperlukan suatu pemikiran dan kerangka perencanaan yang matang, untuk dapat menyusun kerangka pendukung pendidikan umum bagi Indonesia dalam struktur kemerdekaan teritorial.

Apabila administrasi dan pembiayaan dapat diwakilkan, maka pada saat itu tanggung jawab sekolah/madrasah akan lebih membumi, dan akan mempunyai saran untuk keabsahan sekolah/madrasah dalam memberikan pelatihan (Abidin, 2017). Ketika kepercayaan telah tercapai, itu berarti bahwa itu akan mendorong peningkatan sifat pendidikan. Dengan demikian administrasi subsidi pendidikan sangat penting untuk bekerja pada kualitas. Sebagian besar sekolah dan madrasah yang berbeda mengalami tantangan sejauh kantor dan yayasan, mengatur jumlah staf pembantu dan kapasitas yang tidak memadai untuk memberikan remunerasi kepada instruktur dan staf sekolah mereka. Banyak tenaga pendidik yang melakukan kewajibannya tidak sesuai dengan bidang keahliannya dan keterlibatannya dengan dunia pendidikan, menyebabkan pendidikan menjadi tidak ideal dan tidak berkualitas dan bahkan tertinggal jauh. Misalnya ada pendidik yang merangkap sebagai manajer, dan organisasi berubah menjadi instruktur sehingga tidak ada pendidik yang memenuhi syarat, atau ada instruktur yang menunjukkan beberapa mata pelajaran di luar kemampuan logikanya.

Biaya dalam bidang pelatihan memiliki tingkatan yang luas, khususnya setiap jenis konsumsi yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan, baik berupa uang maupun tenaga kerja dan produk. Penunjang pelatihan adalah suatu rangkaian pengaturan, pengambilan, pendistribusian dan pengawasan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan interaksi instruktif yang akan dan sedang diselesaikan.

Dengan demikian, ada tiga jenis dukungan pelatihan, yaitu a) biaya spekulasi unit pendidikan, b) biaya individu, c) biaya operasional unit pendidikan. Biaya usaha untuk unit pelatihan adalah biaya pemberian kantor dan kerangka kerja, penciptaan SDM, dan modal kerja. Pengeluaran pribadi adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh siswa untuk dapat mengikuti pengalaman pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan biaya fungsional satuan pendidikan meliputi: 1) kompensasi dan tunjangan untuk guru dan tenaga kependidikan, 2) bahan ajar dan perangkat keras habis pakai, 3) biaya pekerjaan instruktif yang diserahkan, seperti air, pemeliharaan kantor dan yayasan, tugas, perlindungan, dll (Duratun Nafsah, Widiyanto, 2017).

Sementara itu, masyarakat yang menjadi sumber pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, secara umum dapat dihimpun menjadi 2 (dua) sumber, yaitu dari otoritas publik dan wali/penjaga/pengajar dan daerah setempat (Imron, 2016).

1. Pemerintah.

Pemerintah memang perlu memiliki kepemilikan penuh sejauh memenuhi pilihan untuk mendapatkan sekolah bagi daerah setempat, karena ini adalah perintah dari peraturan yang telah diatur dalam konstitusi negara kita, Indonesia. Otoritas publik, dalam situasi ini, baik fokus maupun teritorial memiliki komitmen yang sama dalam menetapkan rencana pembiayaan pelatihan dalam rencana keuangan belanja negara, baik APBN maupun APBD. Berapa besar rencana pembiayaan pelatihan yang ditetapkan oleh penguasa umum sesuai amanat UUD RI pasal 31 ayat 4 tahun 1945 sebesar 20% dari APBN dan APBD. Bagi daerah lumrah dan daerah/pemerintah daerah, pembinaan dasar baik jalur sekolah maupun luar sekolah bergantung pada Undang-undang Tidak Resmi (PP) nomor 48 tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan.

Dinyatakan secara eksplisit bahwa cadangan sekolah selain dari tarif gaji pendidik dan biaya Pendidikan resmi didistribusikan kira-kira 20% dari APBN untuk tempat pelatihan dan tidak kurang dari 20% dari APBD. Tarif gaji pendidik dan guru yang ditunjuk oleh otoritas Publik ditetapkan dalam APBN dan APBD. Kerja sama daerah dalam pelatihan berbasis daerah adalah dengan mengikuti pergantian acara, pelaksanaan program pendidikan, dan penilaian sekolah, serta dewan dan subsidi sesuai prinsip instruksi publik. Aset untuk melaksanakan pelatihan berbasis daerah dapat muncul dari direktur, daerah setempat, otoritas Publik, administrasi yang dijalankan Negara Provinsi serta berbagai sumber yang tidak berjuang dengan peraturan dan pedoman yang sesuai.

2. Wali/penjaga/pendamping dan daerah setempat.

Sumber pembiayaan pendidikan selain pemerintah adalah wali/penjaga/pendamping dan daerah setempat, biasanya berupa Hadiah Peningkatan Pendidikan (SPP), yang dulu berupa BP3, uang kemajuan, dll mengingat pengaturan yang ada.

Implikasi Manajemen Pembiayaan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Sebagai pekerjaan untuk bekerja pada sifat Pendidikan, dukungan dan pembiayaan pelatihan sangat penting, dengan cara ini otoritas publik memaksakan standar yang mengharuskan

semua kepala unit pelatihan untuk mencari dan mengedarkan semua subsidi sesuai pedoman yang relevan. Padahal ada strategi yang dilakukan otoritas publik terkait dengan perluasan rencana belanja dengan menetapkan 20% cadangan pelatihan, baik dari APBN maupun APBD. Ini benar-benar sesuai dengan sifat pendidikan kita di Indonesia. 20% dari dukungan pelatihan harus dimanfaatkan secara ideal sesuai pedoman dan pedoman yang ada. Namun demikian, penggunaan anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pusat dan negara bagian juga harus dilakukan dengan menggunakan standar kejujuran dan tanggung jawab.

Upaya kerja yang bersifat pembinaan, khususnya Pendidikan merupakan tokoh utama yang menggarap sifat SDM. Kehadiran SDM yang merata juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membantu pembelajaran di madrasah. Variabel-variabel tersebut sebagai pendidik yang ahli, jabatan dan kerangka kerja yang memadai, serta penunjang pembelajaran siswa sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan madrasah diharapkan mampu menciptakan siswa yang maju, berkualitas, halus dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Ini tidak akan puas dengan asumsi bahwa tidak ada aset yang memadai untuk bekerja pada sifat sekolah di madrasah. Dengan cara ini, biaya harus diawasi sebaik mungkin untuk kelancaran dan diarahkan untuk bekerja pada sifat pelatihan. Kualitas harus terlihat apabila di madrasah para siswa mengalami perubahan yang menyangkut cara pandang, tingkah laku, serta perluasan wawasan dan kemampuan siswa yang bersekolah di madrasah.

Implikasinya, empat bagian yang menentukan kemajuan madrasah dalam menggarap hakikat pendidikan memerlukan alokasi dana cadangan (Haekal et al., 2022).

1. Akreditasi

Program sertifikasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh Badan Kewenangan Bersama terus memberdayakan sekolah/madrasah untuk memenuhi kebutuhan dan sifat pelaksanaan sesuai dengan 8 (delapan) SNP. Peningkatan Sekolah Percontohan Gratis, Sekolah Standar Negeri dan Sekolah Berstandar Dunia menunjukkan arah untuk memperkuat program penjaminan dan memperbaiki sifat Pendidikan. Karena untuk mendapatkan otorisasi yang baik tentunya harus benar-benar bekerja keras, hati-hati, harmonis antara berbagai pihak, baik siswa, guru, pekerja, dewan pengawas, dan penjaga gawang siswa dan tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah karena perluasan mensubsidi. Pembiayaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi.

2. Siswa

Siswa merupakan input terpenting bagi lembaga pendidikan yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, proses KBM/PBM tidak akan tercapai, peserta didik memegang peranan penting dalam lembaga pendidikan dan penerimaan peserta didik baru merupakan ujung tombaknya. Program pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan minat siswa. Dalam mendukung terwujudnya keberhasilan program kurikuler siswa lebih ditekankan pada kemampuan intelektual yang mengacu pada kemampuan berpikir rasional, sistematis, analitis dan metodis sedangkan program pengembangan siswa melalui

ekstrakurikuler untuk mempertajam pemahaman keterkaitan mata pelajaran. Dengan ekstrakurikuler siswa dibina menuju pemahaman, kesetiaan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti dan kepribadian bangsa, budi pekerti luhur, kesadaran berbangsa dan bernegara, keterampilan dan kemandirian, olahraga dan kesehatan, serta budi pekerti, apresiasi, dan kreasi seni.

3. Guru

Guru merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting sebagai media penunjang belajar siswa. Kualitas siswa tergantung pada peran guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh guru juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah. Kualitas siswa tergantung pada peran guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk menunjang itu semua, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, lokakarya dan sebagainya. Peningkatan kesejahteraan guru, hal ini bertujuan untuk mengacu pada peningkatan mutu pendidikan dan proses pembelajaran agar guru dapat bersaing dalam meningkatkan kinerja mengajarnya dan sekaligus akan berimplikasi pada kualitas peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pendidikan yang telah ditempuh guru juga berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

4. Sarana dan prasarana

Peningkatan mutu pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh pengelolaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu madrasah perlu mengelola sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Adanya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran sarana dan prasarana sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, membantu memperlancar pembelajaran bagi siswa, mampu menarik perhatian siswa lebih besar dan menarik minat siswa untuk belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu, dapat disimpulkan antara lain: Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang paling penting dan utama. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu diperlukan dana pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembiayaan pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas sekolah/madrasah, sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Implikasi Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Pembiayaan Pendidikan adalah melalui penganggaran/alokasi dana dalam RAPBM yaitu mengalokasikan dana untuk peserta didik dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, mengalokasikan dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji

dan tunjangan, mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan penambahan sarana, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan. dalam standar pembiayaan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi satuan pendidikan, b) biaya pribadi, c) biaya operasional satuan pendidikan. Sehingga dalam mengelola pendidikan, sistem pembiayaan inilah yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan SBU (standar biaya umum) dan SBK (standar biaya khusus) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

REFERENSI

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 87–99. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/95>
- Apriyani, A., Safidah, N., Awilisni, S., & ... (2022). Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Unisan ...*, 01(03), 277–287. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/674%0Ahttp://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/download/674/314>
- Aryani, R. U., Isdasari, N., & Murtafiah, N. H. (2022). PENERAPAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Bandar Lampung). *Unisan Jurnal*, 01(04), 212–222. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/download/688/331>
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2), 26–36.
- Duratun Nafsah, Widiyanto, W. S. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 788–797.
- Fathoni, Z. (2019). *Manajemen Pembiayaan Lembaga PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS ZISWAF (Studi pada Pesantren Tahfizh Alam Qur ' an Ponorogo) TESIS Oleh : November*, 1–114. www.iainponorogo.ac.id
- Fattah, N. (2018). IMPLIKASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MTsS DI PONPES MODERN MAQAM MAHMUDA KABUPATEN ACEH TENGAH. *As-Salam*, 2(3), 25–33.
- Haekal, T. M., KS, M. M., Yusuf, M. I., Wahyudi, M. A., Fajri, Y., & ... (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V3RdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA123&dq=modernisasi+sitem+administrasi+perpajakan&ots=4iIL90WcO9&sig=bf8gjqzSmuKbsFh5v8S0ZSONqvI>
- Imron, M. J. (2016). Manajemen pembiayaan sekolah. *Al - 'Ibrah*, 1(1), 69–93.
- Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 263–269. <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9620>

- Mansyur, M. H. (2018). Penguatan Manajemen Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, 2(2), 354–367.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73.
<https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.88>
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2).
<https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Murtafiah, N. H. (2021). *Analisis Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Profesional (Studi Kasus : IAI An-Nur Lampung)*. 789–812.
<https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2358>
- MURTAFIAH, N. H., & HIDAYAH, H. (2022). Human Resource Development in Islamic Educational Institutions in Warding Off Proxy War in the Age of Disruption. *Tianjindaxuexuebao.Com*, 03. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9GY4S>
- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53–64.
<https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3384>
- Rohiyatun, B. (2019). Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 4(1).
<https://doi.org/10.33394/vis.v4i1.1974>
- Warisno, A. (2018). Implementing a Quality Learning in Schools. *Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 1–12.
- Zulkarnain, Kurniawati, D., Farida, U., & Murtafiah, N. H. (2022). Manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. *UNISAN JOURNAL : Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 01(04), 161–168.